

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengertian politik, menurut Aristoteles (384-322 SM) dalam buku Carlton Clymer Rodee dkk, yang berjudul *Pengantar Ilmu Politik*.¹ menyatakan istilah politik (*politics*) sering dikaitkan dengan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik ataupun sistem politik ataupun negara yang menyangkut proses penentuan tujuan sampai dalam melaksanakan tujuan tersebut politik pemahaman orang Yunani tentang politik boleh dikatakan amat luas, kata yang berasal dari bahasa mereka itu sendiri itu diartikannya sebagai “negara-kota” (*polis*).

Merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang pada dasarnya adalah “binatang politik” dengan itu ia menjelaskan hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik.

Selain itu Jean Bodin (1530-1596)² dalam buku yang sama, menyatakan politik diartikan secara lebih sempit dibandingkan dengan pengertian orang Yunani memperkenalkan istilah ilmu politik (*science politic*) antara abad keenam belas sampai awal abad kedua puluh, pandangan Jean

¹ Carlton Clymer Rodee dkk. (2000). *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 2

² *Ibid.* h. 3

Bodin ini kemudian diperkuat filosofi Perancis lainnya.

Niccolo Machiavelli (1469-1527) dalam buku Prof. Dr. Anwar Arifin yang berjudul *Perspektif ilmu politik*.³ Dipandang sebagai bapak ilmu politik modern, memperkenalkan istilah bahwa negara adalah simbol kekuasaan tertinggi yang sifatnya semua dan mutlak, karena kekuasaan adalah awal dari terbentuknya negara. Kekuasaan itu mutlak ada di dalam diri, bukan berasal dari tuhan atau doktrin agama.

Beberapa tahun kemudian, Montesquie (1689-1755)⁴ menyatakan bahwa fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kategori ini mendapatkan tempat dalam konstitusi Amerika Serikat termasuk asumsi Montesquie bahwa kebebasan akan lebih terjamin dengan adanya pembagian fungsi yang berbeda pada lembaga-lembaga pemerintahan yang terpisah di Amerika Serikat: kongres, Eksekutif dan pengadilan.

Berdasarkan perspektif ini dapat dipahami bahwa para ahli ilmu politik akan memusatkan perhatian, semata-mata dan sampai pada sekarang ini, pada organisasi dan sistem kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, yang melaksanakannya dan yang menampung pertentangan yang timbul dari kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam penafsiran tentang undang-undang⁵

³ Prof. DR. Anwar Arifin, (2015). *Perspektif ilmu politik*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, h. 2

⁴ Carlton clymer rodee.dkk, *op. cit*, h. 3

⁵ *Ibid.* h. 2-3.

Dari beberapa pengertian politik diatas, Politik pemilu langsung adalah sistem untuk pemilihan pemegang jabatan politik dimana pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk suatu kandidat, pasangan calon atau partai politik yang mereka inginkan agar mereka tersebut dapat terpilih dalam sistem pemilihan Presiden/Wakil presiden kalau sebelumnya Presiden/Wakil presiden dipilih oleh MPR, sejak 2004 Presiden/Wakil presiden dipilih secara langsung.⁶

Pemilihan seperti ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan demokrasi, mencegah ‘pembajakan kekuasaan’ oleh para wakil rakyat di MPR, dan untuk menciptakan adanya akuntabilitas yang lebih baik daripada pemimpin kepada rakyat, agar Presiden/Wakil presiden terpilih itu memperoleh legitimasi kuat proses penentuan pemenangnya menggunakan prinsip mayoritas mutlak artinya, calon yang menang harus memperoleh dukungan 50% +1, ditambah memperoleh dukungan minimal 20% di separuh provinsi dan kabupaten, kalau tidak ada maka diadakan pemilihan tahap kedua (*second round*)⁷

Dalam pemilu 2019 yang diselenggarakan pada 17 april 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. hal ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya

⁶ Prof.DR.Kacung marijan,(2000). *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta.prenada media group, h.100-102

⁷ *Ibid*, h.100-102

tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Dari pemilu langsung di atas khususnya tentang Pilpres 2019, politik menjadi pusat perhatian seluruh lapisan masyarakat

Dalam hal Transportasi ojek *online*, kebutuhan ojek *online* semakin besar, jumlah driver ojek *online* juga semakin banyak, bukan hanya melahirkan satu atau dua perusahaan layanan ojek *online*, namun juga beberapa perusahaan. Perusahaan pertama yang mempunyai pasar yang paling besar adalah Gojek, yang kedua ada Grab⁸

Transportasi ojek *online*, perusahaan Gojek yang berdiri pada 2010, yang didirikan Nadiem Makarim, Gojek adalah merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek berbasis *online*. Sistem pemesanan ojek dengan Gojek *mobile apps* diantaranya dapat memudahkan sistem dari cara *process orders faster* – kecepatan dalam memesan sebuah Gojek, tak perlu berlama-lama untuk memesan ojek melalui aplikasi lewat Gojek.

Dan jarak tempuh dan harga yang akan dibayarkan calon penumpang, terlihat jelas di layar setelah memilih tempat penjemputan dan tujuan pengantaran setelah itu *no cash needed*, pada saat ini industri jasa transportasi ojek semakin marak di Indonesia. Gojek, merupakan salah satu badan usaha yang mengkonsentrasikan salah satu bidangnya di sektor

⁸ Arisetyanto Nugroho, *Peran Promosi dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen Ojek Online. 2018*, dalam jurnal Ilmiah, Manajemen Bisnis, Vol 4, No 3, h. 296

industri jasa transportasi yaitu layanan ojek *online*.⁹

Transportasi ojek *online*, Grab berdiri sejak tahun 2011, yang didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak saat itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Grab yaitu menyediakan kebebasan untuk mencapai tempat, yang aman dan nyaman, kebebasan memilih roda transportasi terbaik, dan kebebasan.

Grab juga yang dimana perusahaan yang berbasis transportasi online, menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan termasuk perjalanan, pesan- antar makanan, pengiriman barang dan pembayaran menggunakan dompet digital. Salah satu perusahaan penyediaan layanan jasa transportasi online yang kini berkembang sangat pesat sebagai *social entrepreneurship* inovatif untuk mendorong sebuah perubahan.¹⁰

Driver ojek *online* dalam hal ini dapat terlibat langsung dalam Pilpres 2019. Dilihat dari permasalahan timbul disini calon Presiden dan wakil Presiden no urut 02 dengan menggelar diskusi bertema “Transportasi *Online*, Kesejahteraan atau Solusi Transportasi”. Calon Presiden no urut 02 merasa cemas terhadap gaya pemuda Indonesia yang memilih menjadi tukang ojek begitu lulus Sekolah menengah atas, ia juga menggambarkannya dalam sebuah presentasi yang menunjukkan meme gambar 4 penutup kepala, yakni topi

⁹ Ery Hartati Yulistia, *Analisis Pengguna Layanan Go-Jek Di kota Palembang*. 2017, dalam jurnal TAM (*Technology Acceptance Model*), Vol 8 h. 102.

¹⁰ Zulfahmi, Skripsi: *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Online Grab* (Makassar:UHM, 2018), h. 37

Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama, Sekolah menengah atas, kemudian helm berwarna hijau. Calon Presiden no urut 02 hanya khawatir kenapa negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bukan bermaksud merendahkan tukang ojek.

Dalam hal ini keberadaan transportasi *online* khususnya ojek *online*, menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja. Timses calon Presiden dan calon wakil Presiden no urut 02 juga mengingatkan janji pemerintah menciptakan 10 juta lapangan kerja hingga kini masih belum direalisasikan.

Ini berfokus pada ekonomi dan kesejahteraan, bukan berarti isu ojek online ini menjadi isu yang tak berarti apa-apa, melalui pernyataan yang dilontarkan calon Presiden no urut 02, pengemudi ojek *online* ini tak mempermasalahkan hal tersebut/mereka tidak merasa terlecehkan tentang pernyataan yang dilontarkan calon Presiden no urut 02, justru pengemudi ojek *online* merasakan perihnya anak bangsa yang kondisinya seperti itu tidak bisa diberikan regulasi tersebut dan pengemudi ojek *online* akan menentukan pilihan mereka agar tidak dimainkan politik.¹¹

Selain itu untuk pemilihan Presiden 2019 ini. Tentu disini pengemudi ojek *online* akan mencari tahu bagaimana karakter calon- calon Presiden, informasi mengenai kepemimpinan dan pastinya hal ini akan dikaitkan dengan visi- misi/ program mereka, pada intinya visi- misi dan program ini merupakan sarana pengenalan diri atau sebagai identitas yang

¹¹ Prabowo pahlawan ojek *online* <https://pinterpolitik.com/prabowo-pahlawan-ojek-online/>, diakses 16 agustus 2019

mereka miliki pada calon Capres dan Cawapres pada pilpres 2019.¹² Dari visimisinya dan program tersebut, pengemudi ojek *online* memiliki gambaran atau perilaku untuk memilih yang mereka anggap layak, dalam hal ini hasil yang belum dirasakan khususnya pengemudi ojek *online* pada janji - janji pemerintah yang belum terealisasikan pada pilpres 5 tahun belakang.

Pola kehidupan politik tentu saja berubah dalam hal ini, pada pilpres 2019 pengemudi ojek *online* berhak ikut berpolitik artinya, tak ada larangan bagi pengemudi ojek *online* untuk menyampaikan pendapat pasangan calon apa yang ingin mereka pilih, baik dari calon Capres dan Cawapres no urut 01 dan calon Capres dan Cawapres no urut 02

Dalam hal ini bermunculan cara perilakunya driver ojek *online* yang, dalam tanggapan penumpang alasan driver dilihat, dari cara memperlihatkan, sikap, tingkah laku, pernyataanya, perasaan, persepsi dan pembicaraan politik terhadap Pilpres 2019.

Semua orang bisa membahas politik termasuk pengemudi ojek *online*, yang sering mendiskusikan kepada penumpang tentang apa yang mereka ingin pilih, tentang pilpres 2019 contoh seorang pengemudi Gojek dan pengemudi Grab yang membahas pilpres 2019 ini, sepanjang perjalanan hingga sampai ke tujuan yang ingin akan rasa tahu politik yang lebih dalam/mendalami apa itu politik, khususnya di kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan, dengan kondisi luas wilayah kota Palembang kurang lebih 400,61km². Yang secara administrasi terbagi

¹² Sherly Nelsa Fitri, *Pro Kontra Gerakan Tagar #2019 Ganti Presiden Sebagai Sarana Kampanye Dalam Pemilu*, Vol 4. No2 h. 297.

atas 18 kecamatan dan 107 kelurahan.¹³

Melalui perilaku politiknya rakyat dapat terlibat langsung. Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti, merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga - lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik.¹⁴ pada umumnya perilaku politik ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti *idealisme*, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan, sosial politik dan sebagainya.

Sejalan dengan pengertian perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu, tentang calon Presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres), dari pasangan calon 01 yaitu, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan dari pasangan calon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang perilaku politik mengenai sesuatu yang dilihat, dari cara memperlihatkan, sikap, tingkah laku, pernyataan, perasaan, persepsi dan

¹³ Kota Palembang, <http://e-journal.uajy.ac.id/7731/4/TA313399.pdf>. diakses tanggal 3 juli 2019

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Pt Grasindo. 1992 h. 15

pembicaraan politik dalam pilpres 2019, inilah yang disebut kebebasan berpendapat, di politik indonesia pemilu langsung, dalam pilpres 2019 ini, mengundang pusat perhatian bagi masyarakat khususnya di kota Palembang

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku politik pengemudi ojek *online* terhadap calon capres dan cawapres pada pilpres 2019 di kota Palembang ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku politik pengemudi ojek *online* dalam pilpres 2019 khususnya di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana (Perilaku Politik Pengemudi Ojek *Online* Pada Pilpres 2019 di Kota Palembang)
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor- faktor yang muncul dalam perilaku politik pengemudi ojek *online* dalam pilpres 2019 khususnya di kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu politik terkhusus mahasiswa jurusan ilmu politik, dan masyarakat pada umumnya
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang berarti serta sebagai masukan dan tambahan bagi penulis,

Perusahaan Gojek dan Grab, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang membahas mengenai (Perilaku Politik Pengemudi Ojek *Online* Terhadap Capres Dan Cawapres Pada Pilpres 2019 di Kota Palembang) telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain yaitu:

Pertama, penelitian dari Prisilia Claudia Oley, dengan judul *Perilaku Politik Aktivistis Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Suatu Studi Terhadap Pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Tahun 2012)*, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Sam Ratulangi¹⁵, peneliti menjelaskan metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

¹⁵ Prisilia Claudia Oley, *Perilaku Politik Aktivistis Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Suatu Studi Terhadap Pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Tahun 2012)*, dalam jurnal *politico*, 2013. vol 2. no 2 h. 6-7

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu sesuai kepentingan peneliti untuk memperoleh data, sesuai dengan topik penelitian. Dimana pemilihan informan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan peneliti, sehingga yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus dari organisasi mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sam Ratulangi tahun kepengurusan 2012.

Fokus penelitian ini adalah meneliti perilaku politik mahasiswa dengan menggunakan teori pendekatan orientasi politik individu, dimana mahasiswa seharusnya mengetahui peran dan fungsinya dalam sistem politik bangsa, yaitu secara konsep (*concept*) mahasiswa berpolitik dengan memberikan gagasan, pemikiran, solusi bagi masalah yang terjadi disekitarnya, sedangkan secara kebijakan, mahasiswa menjadi kelompok penekan (*pressure group*) dalam sistem politik dimana mahasiswa ikut berperan aktif dalam kehidupan demokrastiasi bangsa dengan melakukan tindakan - tindakan politik seperti demonstrasi dan sebagainya.

Dengan menggunakan teori orientasi politik individu, peneliti mencari tahu tentang pengetahuan (kognitif) informan dalam mengetahui peran dan fungsi dari mahasiswa dalam kehidupan politik, kemudian mencari tahu pendapat atau perasaan (*afektif*) dari informan mengenai kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah mengetahui hal tersebut berlanjut kepada tindakan atau apa yang informan lakukan dalam merespon hal - hal yang sudah informan ketahui, untuk mengetahui perilaku politik dari informan.

Yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam (*depth interview*), yakni data di kumpulkan melalui wawancara yang mendalam pada setiap objek penelitian. Sedangkan data sekunder di peroleh dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sam Ratulangi, untuk mendapatkan sejarah fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Unsrat, juga literatur ataupun tulisan mengenai sejarah gerakan mahasiswa Indonesia.

Selain itu juga untuk kebutuhan penulisan, peneliti juga mengambil data dari informan yang mengetahui mengenai sejarah gerakan mahasiswa Unsrat Manado melalui wawancara kepada informan yang dianggap mampu untuk dapat menjelaskan mengenai sejarah gerakan mahasiswa Unsrat.

Kedua, penelitian dari Kifly CH. Setligt dengan judul, *Perilaku Politik Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Poliik (Studi Di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)*,¹⁶ peneliti menjelaskan dalam rangka partisipasi politik, kemampuan, kualitas dan kemandirian lembaga kemasyarakatan perlu terus di tingkatkan, sehingga dapat menjalankan perannya secara mantap dalam tatanan budaya politik. Dalam kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat di Desa Kapitu kecamatan Amurang Barat menunjukkan pola partisipasi yang konvensional, dalam arti berdasarkan keadaan atau tatacara-tatacara, tergantung pada perilaku politik pemerintahnya.

¹⁶ Kifly CH.Setligt, *Perilaku Politik Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Poliik (Studi Di Desa Kapitu Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)*, jurnal *politic*. 2013. vol 1. no 3 h. 1

Demikian juga halnya dengan perilaku politik pemerintah terhadap partisipasi politik masyarakat, ada hubungan erat dengan artikulasi aspirasi masyarakat itu sendiri, dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sedang dirasakan oleh masyarakat, merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan politik dan pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengikut sertakan masyarakat untuk rencana pembangunan serta pembuatan kebijakan.

Dengan adanya perilaku politik ini, masyarakat lebih mengenal dan memahami etika, moral, dan nilai-nilai politik pemerintah, yang kemudian akan mempengaruhi partisipasi politiknya. dengan kata lain, perilaku politik pemerintah merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan politik, dan juga merupakan mata rantai diantara sistem politik.

Ketiga, penelitian dari M Hanif Thohari dan M Jacky dengan judul, *Perilaku Politik Santri dalam Pemilu Legislatif 2014*, program studi sosiologi, fakultas ilmu sosial, Universitas Negeri Surabaya,¹⁷ peneliti menjelaskan kaum santri memiliki catatan sejarah cukup panjang dan dinamis dalam dinamika politik nasional, terutama setiap kali penyelenggaraan pemilihan umum, santri sering menjadi fenomena unik dan menarik dalam menggalang suara.

Tulisan ini meneliti bagaimana strategi dan perilaku santri yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (politisi santri) dalam

¹⁷ M Hanif Thohari dan M Jacky, *Perilaku Politik Santri dalam Pemilu Legislatif 2014*, program studi sosiologi, fakultas ilmu social, Universitas Negeri Surabaya, 2015. vol 3. no 1 h. 1-8

mencari dukungan suara pada pemilihan umum legislatif pada tahun 2014. metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. lokasi penelitian ini dilakukan di kota surabaya dan kabupaten sidoarjo, jawa timur. Subjek penelitian ini adalah calon anggota legislatif pada pemilu 2014 yang tergolong santri. teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu primer dan sekunder. analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori tindakan sosial max weber.

Penelitian ini memperlihatkan perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014 yang cenderung beragam, dengan pendekatan tindakan sosial yang berbeda yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional. Tindakan rasional instrumental bisa dilihat pada perilaku politisi santri yang misalnya pada penggunaan baliho tanpa terlalu menampilkan simbol-simbol dan bahasa agamis. sedangkan tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional tindakan tradisional ini misalnya dilakukan politisi santri yang menggunakan bahasa-bahasa atau simbol agamis saat melakukan kampanye politik.

Peneliti menyimpulkan perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2014 cenderung beragam, dalam arti tidak semua politisi santri menggunakan pola-pola perilaku dan strategi politik yang agamis, atau otoritas tradisional-karismatik dalam konsep max weber Pada pemilu ini simbol-simbol agama tidak terlalu menjadi prioritas politisi santri dalam menggait massa justru perilaku yang lebih rasional dan umum menjadi satu hal yang cenderung banyak dilakukan.

Secara umum, paling tidak ada tiga kategori pola perilaku politik ataupun strategi yang dilakukan politisi santri, yaitu pertama penggunaan baliho dan semacamnya, kedua kampanye blusukan, menghadiri forum atau pengajian, ketiga pemanfaatan jaringan sosial dan tim sukses.

Beberapa kategori tersebut semuanya dilakukan subjek pada penelitian ini, namun dengan pendekatan tindakan sosial yang berbeda yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional, tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai tindakan ini bisa dilihat pada perilaku politisi santri yang misalnya pada penggunaan baliho tanpa terlalu menampilkan simbol-simbol dan bahasa agamis.

Sedangkan tindakan tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional, politisi santri melakukan tindakan atau perilaku hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, hanya mengandalkan fanatisme agama atau golongan, tanpa menyadari bahwa tujuan dan cara yang harusnya digunakan adalah menyangkut kepentingan umum, bukan hanya fokus pada sisi agamis atau golongan saja. Tindakan tradisional ini misalnya dilakukan politisi santri yang menggunakan bahasa-bahasa atau simbol agamis saat melakukan kampanye politik.

Keempat, penelitian dari Rahmi Nuraini, dengan judul *Perilaku Politik Legislator Perempuan Dalam Memperjuangkan Kepentingan*

Perempuan, fakultas ilmu komunikasi, Unissula Semarang,¹⁸ peneliti menjelaskan, masih kurangnya penanganan isu-isu yang berkenaan dengan perempuan serta peraturan daerah yang diskriminatif, membuat keterwakilan perempuan di bidang politik sangat penting demi terciptanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan. Untuk itu, penelitian ini bermaksud mengkaji perilaku politik legislator perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi jawa tengah. Dengan mendasarkan diri pada asumsi dasar "muted group theory"

Dengan menggunakan metoda analisis etnografi kritis, dihasilkan bahwa perjuangan kepentingan perempuan baik secara kognisi, afeksi dan behavioral menemui hambatan yang berasal dari konstruksi budaya patriarki yang memberikan opresi melalui bahasa politik verbal dan nonverbal yang merendahkan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bahasa politiknya, perempuan tidak harus mentransformasikan bahasa politik dalam model yang diterima oleh laki-laki (model maskulin).

Perempuan dapat mengembangkan model alternatif untuk mengekspresikan pengalaman dan kode dalam pesan sebagai upaya mendefinisikan bahasa yang lebih dapat diterima, model *alternative* yang menggabungkan model maskulin dan *feminine* ini merupakan solusi terbaik legislator perempuan untuk mengurangi opresi yang dilakukan oleh laki-laki. Model maskulin dalam bahasa politik perempuan dilakukan mengadopsi nilai-

¹⁸ Rahmi Nuraini, *Perilaku Politik Legislator Perempuan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan*, fakultas ilmu komunikasi, Unissula Semarang, jurnal ilmiah komunikasi. 2011-2012, vol 2. no 2 h. 105-106

nilai bahasa maskulin yaitu intonasi yang tegas, membalas guyonan dan konotasi seksual. sementara model *feminin* dilakukan dengan mengubah kelemahan perempuan yang dianggap *feminin* menjadi kekuatan secara verbal dan nonverbal.

Kelima, penelitian dari Rizki Rahman Harahap, dengan judul *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil ii Kabupaten Siak, Tahun 2014)*, jurusan sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Riau, Pekanbaru,¹⁹ peneliti menjelaskan penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif. pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang diteliti dan menjadi pokok permasalahan.

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak provinsi Riau, subjek didalam penelitian ini, yang dijadikan subyek adalah dari unsur penyelenggara yaitu panitia pemilih kecamatan (ppk) 1 orang dan masyarakat yang terdaftar di daftar pemilih tetap (dpt) sebanyak 44 orang dengan pembagian 4 orang pemilih dari setiap kampung, teknik penentuan responden penelitian ini melalui teknik *purposive sampling* dan *key informan* atau *key person* dimana peneliti sudah

¹⁹ Rizki Rahman Harahap, dengan judul *Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten (Studi Kecamatan Dayun, Dapil ii Kabupaten Siak, Tahun 2014)*, jurusan sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Riau, Pekanbaru,¹⁹ vol 3. no 2 h. 8-9

memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian.

Sehingga membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara. *key person* ini terbagi dua yaitu tokoh formal dan tokoh informal. tokoh formal ialah ketua ppk kecamatan sedangkan tokoh informal ialah masyarakat sekecamatan dayun yang terdaftar sebagai pemilih. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang diinginkan yaitu : wawancara atau interview langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang mendukung pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu: data *primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek penelitian mengenai permasalahan yang diteliti yang berpedoman pada daftar wawancara yang telah dipersiapkan, yakni masyarakat yang memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Data *sekunder* , yaitu data yang diolah dan diperoleh dari berkas kearsipan dan lampiran data lainnya yang di publikasikan dan mendukung menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. analisis data analisis data dilakukan secara kualitatif, data dan informasi yang berhasil di himpun akan dilakukan analisis dan kemudian akan dituangkan dalam bentuk tulisan. data tersebut dikembangkan dengan teori-teori pendukung yang relevan dengan analisa data deskriptif diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan fakta

yang ada secara mendalam.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, di atas hal tersebut berbeda dengan penulis teliti, dikarenakan penelitian mengenai (Perilaku Politik Pengemudi Ojek *Online* Terhadap Capres dan Cawapres Pada Pilpres 2019 di Kota Palembang) yang bertujuan untuk melihat cara bagaimana keterlibatan langsung ojek *online* dalam pilpres 2019, dari cara kebebasan pendapatnya dalam konteks pilpres 2019 ini, penelitian yang akan penulis teliti mengenai dari sesuatu yang dilihat dari cara memperlihatkan, sikap, tingkah laku, pernyataan, perasaan, persepsi dan pembicaraan politik tentang pilpres 2019, khususnya di kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat pernyataan yang sistematis, metode logis dan faktual yang dimukakan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah realitas, realitas yang terdapat pada sebuah teori merupakan pemahaman subjektif manusia yang dibuat berdasarkan fakta yang objektif yang tersedia, jadi teori senantiasa didasarkan pada fakta, tapi teori bukan sekadar kumpulan fakta yang tidak saling berhubungan melainkan fakta yang telah diorganisasikan dan diketahui keterikatannya, karena teori berpijak pada fakta, maka sebuah teori akan sangat bermanfaat dalam menjelaskan dan menganalisis suatu gejala tertentu secara faktual.

1. Perilaku politik

Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah Perang Dunia II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons, di samping penemuan-penemuan baru di bidang psikologi. Para sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah Gabriel A. Almond (*struktural functional analysis*), David Easton (*general systems analysis*), Karl W. Deutsch (*communications theory*), David Truman, Robert Dahl, dan sebagainya. salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa perilaku politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik²⁰

Harold d. Lasswell yang dikutip oleh S.P. Varma, memberikan catatan penting mengenai perilaku politik yaitu: pertama, perilaku politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai dan tujuan dibentuk dalam proses perilaku politik, yang sesungguhnya merupakan satu bagian. kedua, perilaku politik bertujuan menjangkau masa depan, bersifat mengantisipasi, berhubungan dengan masa lampau, dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu. Dan menurut Robert K carl, bahwa perilaku politik adalah suatu telaah mengenai kelakuan manusia dalam situasi politik²¹

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama:2008) h. 10.

²¹ Edie Purboyo, Skripsi: *Analisis Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar*, (Makassar:UHM, 2013-14), h. 29-31

Perilaku politik menurut Ramlan Surbakti, merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga - lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik.²² sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu tersebut hal ini jugalah yang membagi perilaku politik, menjadi dua bagian yaitu:²³

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah
2. Perilaku politik warga negara biasa (baik individu maupun kelompok)

Yang pertama bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua berhak mempengaruhi pihak pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut pihak kehidupan kedua. kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara biasa (individu maupun kelompok) disebut partisipasi politik

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:Pt Grasindo. 1992 h. 15

²³ *Ibid*, h. 16

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu:

1. Aktor politik (meliputi aktor politik, aktifitas politik, dan individu warga negara biasa)
2. Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan)
3. Topologi kepribadian politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti otoriter, *machiavelist*, dan demokrat)

2. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik

Dalam meneliti perilaku politik, pada umumnya perilaku politik ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri seperti *idealisme*, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan, sosial politik dan sebagainya. Perilaku yang menyangkut persoalan politik, berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

Oleh karena itu perilaku politik merupakan tindakan masyarakat atau pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan atau pencapaian tujuan terkait keputusan politik baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya, sebagai insan politik setiap warga negara tentunya melakukan tindakan politik, dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada

perilaku politik pengemudi ojek *online* terhadap Capres dan Cawapres pada pilpres 2019 di kota Palembang²⁴

3. Teori Sikap dan Perilaku Politik

a. Teori *marxis* dan teori kelas

Teori *marxis* mengemukakan bahwa sikap dan perilaku politik dibentuk oleh institusi- institusi kapitalis yang memastikan bahwa sistem yang ada akan ‘mereproduksi diri’, dan bahwa kepada massa ditanamkan kesadaran semu. (keadaan pikiran kelas pekerja yang dikondisikan oleh kelas penguasa untuk menutup-nutupi sifat sebenarnya dari *kapitalisme* dan kepentingan pribadi pekerja)²⁵

Antonio Gramsci (1891-1937) dalam buku Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, yang berjudul *Perbandingan Sistem Politik (teori dan fakta)*.²⁶ menggunakan istilah hegemoni (menunjukkan kepentingan kelas, politik atau negara yang sedemikian kuatnya sehingga ia tidak harus mengandalkan kekuatan atau kekuasaan untuk mempertahankan pemerintahannya karena nilai- nilai dan sikapnya telah diterima atau karena rakyat tidak berani menentangnya), dari sudut pandang ini, budaya politik tidak lain adalah “superstruktur” yang dibangun dengan substruktur materi dari cara produksi kapitalis beserta sistem kelasnya. Tidak ada yang bisa direkomendasikan dari teori-teori *Marxist* yang

²⁴ DRS. Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press. 1995. hal 3-4

²⁵ Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth (2016), *Perbandingan Sistem Politik (teori dan fakta)*, Bandung, Nusa Media h. 241

²⁶ *Ibid.* h. 242

kaku dan *vulgar* (yakni, *Marxisme* yang mentah dan kelewat menyederhanakan masalah) tersebut.

b. Teori elit

C. Wright Mills (1916-1962) dalam buku Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, yang berjudul *Perbandingan Sistem Politik (teori dan fakta)*,²⁷ menjelaskan bahwa AS dikuasai oleh sekelompok kecil orang-orang yang mewakili 'kompleks industri militer' dan terdiri dari para pemimpin militer, konglomerat, dan pemimpin politik. Mills berpendapat bahwa kelompok ini berasal dari latar belakang kelas-menengah dan kelas-atas yang sama: dengan latar belakang keluarga, sekolah, dan perguruan tinggi yang saling berhubungan, berpikir dan bertindak dengan cara serupa dan menjalin hubungan erat dan menempati kedudukan tinggi dalam kehidupan publik dan pribadi.

c. Teori pilihan rasional

Anthony Downs dalam buku Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, yang berjudul *Perbandingan Sistem Politik (teori dan fakta)*,²⁸ menjelaskan bahwa para pemilih yang rasional dan berkepentingan diri mendukung partai yang paling berkemungkinan untuk mewakili kepentingan mereka, untuk kepentingan mereka, partai politik akan berupaya memaksimalkan kekuasaan dengan menarik minat rata-rata

²⁷ *Ibid.* h. 243

²⁸ *Ibid.* h. 244

pemilih, yang memiliki sikap dan preferensi umum di antara mayoritas rakyat.

Mengasumsikan bahwa politik itu didasarkan pada kalkulasi rasional para pelakunya (individu, organisasi, pemerintah) yang punya kepentingan dan berupaya memaksimalkan preferensi masing-masing, banyak teori pilihan rasional berpangkal dari pendapat bahwa dunia politik dihuni oleh individu-individu dan juga instansi- instansi yang mengambil pilihan rasional untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing artinya perilaku politik mereka didasarkan atas apa yang menjadi kepentingan mereka.

d. Teori modal sosial dan masyarakat sipil

Alexis de Tocqueville (1805-1859) dalam buku Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, yang berjudul *Perbandingan Sistem Politik (teori dan fakta)*.²⁹ menyatakan teori ini memiliki kesamaan dengan teori pluralis, teori ini menyatakan bahwa negara demokrasi tidak bisa hanya memiliki satu pusat kekuasaan tunggal, tetapi memerlukan banyak pusat kekuasaan sehingga banyak orang dan kelompok dapat memiliki pengaruh terhadap bermacam persoalan, dengan cara yang berbeda, dan dalam arena politik yang berbeda.

Negara demokrasi membagi kekuasaan secara vertikal (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dan horizontal (bermacam lapisan pemerintahan daerah) guna menciptakan bermacam arena politik.

²⁹ *Ibid.* h. 157-277

kelompok- kelompok yang kalah dalam pertarungan politik di satu arena bisa berpindah ke arena lain, dan mendapat untuk kembali bertarung pada kesempatan lain, misalnya jika mereka tidak puas, mereka bisa membawa perkara ini ke pengadilan.

Dengan demikian, dapat dipahami mengenai kerangka teori dalam penelitian ini yang akan diteliti menggunakan teori pilihan rasional, peneliti memilih teori ini karena dalam teori pilihan rasional ini , perilaku politik pengemudi ojek *online* disini didasarkan pada kalkulasi atas apa yang menjadi kepentingan mereka, yang berupa menyampaikan pembicaraan politik, sikap, gagasan, dan pernyataan, untuk mengetahui apa itu politik yang lebih dalam, kerangka teori diatas cocok digunakan dalam penelitian Perilaku Politik Pengemudi Ojek *Online* Terhadap Capres dan Cawapres Pada Pilpres 2019, khususnya di kota Palembang

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika di belakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik

penelitian tetapi juga metodologi.³⁰ berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian termasuk survey dan pencarian fakta pertanyaan dari jenis yang berbeda dan tujuan dari penelitian tipe ini adalah menggambarkan keadaan seperti yang telah terjadi saat ini, sehingga penulis tidak memiliki kontrol atas variabel tetapi hanya bisa melaporkan apa yang telah terjadi³¹.

Dalam penelitian ini letak deskriptifnya adalah berupa uraian kalimat yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar ada serta berkaitan dengan pengemudi ojek online (Perilaku Politik Pengemudi Ojek *Online* Terhadap Capres dan Cawapres pada Pilpres 2019 di Kota Palembang) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan fenomena atau melibatkan suatu jenis perilaku manusia³² penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (*informal*) dalam latar alamiah.

³⁰ C.R Kothari, (1990). *Research Methodologi, Methods dan Techniques (Second Revises Edition)*, India: Age International, h. 8

³¹ *Ibid*, h. 2

³² *Ibid*, h 3

dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya³³ Prosedur dari penelitian bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data *primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari para informan (orang yang memberikan informasi) dan dalam penelitian ini telah menanyakan 12 informan yang terlibat dalam perilaku politik yaitu, pengemudi ojek online yang dilihat dari sesuatu cara yang memperlihatkan, sikap, tingkah laku, pernyataan, perasaan, persepsi dan pembicaraan politik tentang pilpres 2019 khususnya di kota Palembang.

Kemudian data *Sekunder*, data ini merupakan data pendukung/penunjang dari data primer seperti buku, jurnal, himbauan-himbauan, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan Perilaku Politik (Perilaku Politik Pengemudi Ojek *Online* Terhadap Capres dan Cawapres Pada Pilpres 2019 di kota Palembang)

³³ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 10

3. Teknik Pengumpulan Data

1). Wawancara

Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁴ proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci, berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi dari pengemudi ojek *online*, disini peneliti telah menanyakan 12 informan yang terlibat dalam Perilaku Politik (Perilaku Politik Pengemudi Ojek *Online* Terhadap Capres dan Cawapres Pada Pilpres 2019 di kota Palembang)

Alasan peneliti menanyakan 12 informan yaitu, dilihat dari sesuatu cara yang memperlihatkan, sikap, tingkah laku, pernyataan, perasaan, persepsi dan pembicaraan politik yang berkaitan dengan pilpres 2019 di kota Palembang.

2). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁵ Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan mengadakan kajian dokumen untuk membantu menunjang data penelitian seperti foto-foto, himbauan-himbauan,

³⁴ Sutrisno hadi, (1987), *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, h. 193.

³⁵ Nanang martono. (2016). *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 80

maupun catatan-catatan yang berhubungan dengan pengemudi ojek *online* kota Palembang

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Penetapan lokasi penelitian yang merupakan tahap sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan bisa ditetapkan sehingga mempermudah peneliti melakukan penelitiannya, sedangkan fokus dari penelitian ini adalah perilaku politik dari pengemudi ojek *online*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. di dalam analisis data kualitatif menurut Nanang Martono³⁶ teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini antara lain menggunakan empat tahapan sebagai berikut:³⁷

1. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan, data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap, serta dokumentasi, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan,

³⁶ *Ibid*, h. 11

³⁷ *Ibid*, h. 11-12

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan, bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan.

3. Penyajian Data

Penyajian data berupa aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh, penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses aktifitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan, pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deksripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian sistematika laporan yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, rumusan masalah, termasuk pula menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, lalu terdapat tinjauan pustaka dan kerangka teoritik sebagai acuan penelitian, serta metode penelitian yang menjelaskan tipe penelitian, pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian yang akan diteliti.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bagian bab kedua ini peneliti akan menjelaskan bagaimana keadaan secara rinci mengenai lokasi penelitian, dan akan menjelaskan secara detail gambaran wilayah tersebut

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, hasil data- data yang sudah didapatkan akan dikaitkan dengan temuan di lapangan dan pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab awal, kemudian data yang diperoleh peneliti akan di bahas bagaimana

keterkaitannya dengan teori yang sudah ada serta menjelaskan hasil temuan berdasarkan sudut pandang subjek dengan sudut pandang teoritis

BAB IV PENUTUP

Pada akhir bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian pada bagian saran peneliti memberikan rekomendasi- rekomendasi yang biasa di lakukan oleh pihak yang terlibat.